



**ANALISIS RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh:

Suhartini

Email : suhartini9143@gmail.com

Pembimbing I :

Muhlis Ruslan

Email : muhlisruslan@universitasbosowa.ac.id

Pembimbing II :

Syamsuddin Jafar

Email : syamsuddinjafarsuaib@gmail.com

**Program Manajemen Keuangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa**

ABSTRACT

The aim of this study was to determine and analyze the income and expenditure budget at the Office of the Education Office of South Sulawesi Province and to analyze effective and efficient budget planning at the South Sulawesi Provincial Education Office.

The data source, namely research, was obtained from direct interviews and secondary data in the form of budget planning reports and budget realization for three years from 2018 to 2020. The data methods in this study were library research, field research, and documentation. The data analysis used in this research is descriptive analysis and quantitative.

The results of the research analysis show that the level of efficiency in spending at the South Sulawesi Provincial Education Office in 2018-2020 is declared less efficient. Furthermore, the income effectiveness level of the South Sulawesi Provincial Education Office for the 2018 Fiscal Year is 1,139.6%, which means it is very effective. A significant increase in the budget compared to the previous budget year was due to expenditures from provinces/districts/municipalities, local governments that were not budgeted for in the previous year. Thus, it can be concluded that the amount of spending in 2018- 2019 was declared less efficient and in 2020 it was declared efficient.

Keywords : Plan Analysis, Realization, Income Budget and Expenditure

PENDAHULUAN

pendidikan merupakan hal yang penting untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan merupakan instansi pemerintah yang mendistribusikan layanan untuk masyarakat, dalam menumbuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan Negara. Anggaran belanja merupakan salah satu strategi yang akan digunakan dan dengan mudah merencanakan pengalokasian dana yang di butuhkan dan hingga akan langsung melakukan pengendalian keuangan serta akan menjadi alat pengendalian untuk penggunaan dananya yang apabila terjadi perbedaan antara dana belanja dengan pengaktualannya sehingga akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk penyusunan dana pada tahun berikutnya.

Pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan sangat penting, agar anggaran untuk membiayai semua kebutuhan dan pelaksanaan program dapat sesuai dengan anggaran.. Semua rencana memerlukan dana untuk mendukung rencana tersebut, sehingga pengeluaran harus dialokasikan dengan tepat untuk mengembangkan anggaran yang memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebuah rencana yang baik menghasilkan akan laporan yang tidak diragukan lagi dan hasilnya lebih akurat. Oleh karena itu, dalam hal ini juga pemerintah yang akan menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat dan untuk mencapai pembangunan yang diperlukan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pernyataan agar pemerintahan yang bebas dapat tercipta. Korupsi dan pencurian. Rencana kerja memuat rencana dan rencana anggaran serta tujuan kerja. Rencana dan rencana kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendorong perkembangan dinas pendidikan Dinas Pendidikan. Menurut Hasibuan (2007:49), rencana terdiri dari serangkaian keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan tertentu.

Tahapan dalam penyusunan dana merupakan tahapan rencana kerja pada jangka pendek, untuk penentuan total alokasi dana pada setiap program aktivitas. Dana harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengurangi pemborosan dana serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas, dan harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, yang merupakan tuntutan dari fungsi alokasi. Tahap dana

ini menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan akan menggagalkan penyusunan yang telah disusun.

Penyusunan Dana Pemerintah juga ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disepakati secara bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD dan ditentukan melalui Peraturan Daerah. Upaya kongrit dari pemerintah yaitu dengan menyediakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 standar Akutansi Pemerintah (SAP). Ketentuan ini dijadikan referensi pemerintah pusat dan daerah untuk menghasikan data yang akurat.

Realisasi laporan dana dibuat untuk mempertanggungjawabkan hasil penyusunan dana/anggaran. Laporan ini memuat analisis perbandingan antara berbagai anggaran dan realisasi pada satu periode untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan. Adanya penggunaan Laporan realisasi anggaran akan dilaksanakan penilaian tentang sukses atau gagalnya suatu kinerja organisasi dalam sektor publik dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang bersangkutan. Maka dari itu, hak ini bisa dijadikan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan mendatang

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Anggaran atau yang biasa disebut (*budget*) berasal dari bahasa perancis “*bougette*” yang artinya tas kecil merupakan alat penyusunan, pedoman, pengendalian dan alat pengawasan dibidang keuangan yang di gunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non – laba. Menurut (Munandar 2011) “Suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu”

Perencanaan

Menurut M.Narafin (2009:4) rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta ataupun asumsi yang mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Bastian (2011:61) Realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.

Dalam realisasi anggaran juga menjelaskan tentang proses sistem realisasi anggaran, menurut Bastian (2011:15) pengelolaan operasi atau realisasi anggaran dapat dilihat perspektif yang berbeda, yaitu :

1. Sebagai fungsi, penetapan masing-masing fungsi kedalam departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas tertentu yang saling terkait satu sama lainnya
2. Sebagai penunjang karir, operasi yang telah menjadi tingkatan kerja menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik dibeberapa organisasi
3. Sebagai peringkat keputusan, umumnya pembuatan keputusan melibatkan berbagai langkah dasar yang sama, seperti pengenalan dan penjelasan defenisi masalah, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis alternative kemungkinan, serta memilih dan melaksanakan alternative yang terbaik

Menurut Pahala Nainggolan (2012:14) berdasarkan Siklus Anggaran di atas untuk menyusun anggaran dengan memperhatikan tahapan-tahapan berikut :

1. Tahapan persiapan (*preparation*)

Hal ini dapat disimpulkan melalui pimpinan organisasi/dewan Pembina organisasi dengan memberikan pandangannya mengenai berbagai peluang serta kemungkinan/arahan strategis terkait yang akan dilakukan

2. Tahap Ratifikasi (*ratification*)

Proses selanjutnya adalah pengumpulan/kompilasi seluruh usulan dan mendiskusikannya bersama

3. Tahap Implementation (*implementation*)

Tahap terpenting dalam proses penyusunan anggaran adalah memprediksi sumber dana untuk membiayai kegiatan yang direncanakan dan mengantisipasi besar anggaran setelah itu menentukan besarnya biaya yang akan dianggarkan

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap terakhir adalah menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan yang terdiri dari tiga skenario yang tersedia, pengeluaran per-unit kerja/program dengan menggunakan skenario yang sama, menetapkan biaya tetap pengelolaan organisasi sebagai minimum pendapatan yang harus diperoleh

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komprehensif. Menurut Darise Nurlan (2014:238) laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja,

Menurut Mardiasmo (2015:133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bersifat statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

terbentuknya kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, yaitu pada masa terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) yang di kepalai oleh menteri pengajaran yang bernama Katoppo. Kantor wilayah pada saat itu bertempat di gedung SMA Candra Kirana yang sekarang berada di jalan sungai Tangka Pada tahun 1946-1950, Pada tanggal 1 Januari 2001, Dr. Ir.HM Arifin Talib, Ngaro MP, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173.0 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi Vertikal, Tata Kerja Kanwil Departemen Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diubah menjadi Kementerian Pendidikan, kantor Dinas Pendidikan Provinsi Selatan bertugas dalam hal keuangan mengatur administrasi keuangan serta melakukan penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Deskriptif Data

Laporan keuangan yang akan diukur berdasarkan dana yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, penulis hanya melakukan penilaian laporan dengan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pada laporan keuangan pendapatan dan belanja

1. Hasil analisis keuangan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Dana APBD. Berikut merupakan uraian langkah efisiensi dan efektivitas :

a) Ringkasan data dana mengenai APBD Tahun 2018-2021

Tabel 1.

Daftar Realisasi Dan Anggaran Pertahun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 -2020

No	Tahun	Uraian	PAGU	Realisasi
1	2018	Pendapatan	145.650.000.00	1.662.277.069.60
		Belanja	2.579.455.152.852.42	2.519.744.926.642.00
		Belanja Tidak Langsung	1.894.692.298.330.00	1.862.701.309.602.00
		Belanja Langsung	684.763.854.522.42	657.043.617.040.00
2	2019	Pendapatan	268.845.000.00	997.399.169.80
		Belanja	2.624.917.540.846.05	2.591.982.623.125.00

		Belanja Tidak Langsung	1.917.439.951.345.05	1.893.856.911.750.00
		Belanja Langsung	707.477.589.492.00	698.125.711.375.00
3	2020	Pendapatan	30.180.000.00	809.885.195.40
		Belanja	2.699.275.327.038.90	2.075.138.603.378.00
		Belanja Tidak Langsung	1.845.253.795.439.30	1.773.848.533.778.00
		Belanja Langsung	854.021.531.599.60	301.290.069.600.00

Sumber: Data Diolah 2021

a) Membuat Kesimpulan

Dari hasil menunjukan bahwa untuk belanja, Rencana Anggaran belanja lebih rendah dari rencana dana yang berarti belanja untuk tahun dana 2018-2020 bersifat menguntungkan.

b) Menarik Kesimpulan

Hasil analisis varians dapat diketahui pada bagian pendapatan bahwa realisasi lebih tinggi dari pada anggaran yang telah ditetapkan. Pada bagian belanja, realisasi anggaran belanja lebih rendah dari rencana anggaran yang berarti belanja untuk tahun anggaran 2018-2020 bersifat menguntungkan.

Tabel 4.2
Kesimpulan Analisis Varians

No	Tahun	Uraian	%	Keterangan
1	2018	Pendapatan	1.139.64	Meningkat
		Belanja	97.69	Menguntungkan
		Belanja Tidak Langsung	98.31	Menguntungkan
		Belanja Langsung	95.95	Menguntungkan
2	2019	Pendapatan	370.99	Meningkat
		Belanja	98.75	Menguntungkan
		Belanja Tidak Langsung	98.77	Menguntungkan
		Belanja Langsung	98.68	Menguntungkan
3	2020	Pendapatan	268.35	Meningkat
		Belanja	76.88	Menguntungkan
		Belanja Tidak Langsung	96.13	Menguntungkan
		Belanja Langsung	35.28	Menguntungkan

Sumber: Data Diolah 2021

2. Tingkat efisiensi realisasi dan Anggaran pertahun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020 untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/ proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Tingkat efektivitas daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018-2020 untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara outcome dengan output, yaitu perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan total anggaran pendapatan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

Analisis Efisiensi

1. Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan Realisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Ringkasan Perhitungan Realisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020

No	Tahun	Uraian	PAGU	Realisasi
1	2018	Jumlah Belanja	2.579.455.152.852.42	2.519.744.926.642.00
2	2019	Jumlah Belanja	2.624.917.540.846.05	2.591.982.623.125.00
3	2020	Jumlah Belanja	2.699.275.327.038.90	2.075.138.603.378.00

Sumber: Data Diolah 2021

2. Menghitung tingkat efisiensi dengan cara membandingkan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total realisasi pendapatan dikalikan seratus (100) dalam bentuk persentase.

Analisis Efektivitas

1. Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan Pendapatan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Ringkasan Perhitungan Pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020

No	Tahun	Uraian	PAGU	Realisasi
1	2018	Total Realisasi Pendapatan Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	145.650.000.00	1.662.277.069.60
2	2019	Total Realisasi Pendapatan Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	268.845.000.00	997.399.169.80
3	2020	Total Realisasi Pendapatan Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	30.180.000.00	809.885.195.40

Sumber: Data Diolah 2021

2. Menghitung tingkat efektivitas dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dikalikan seratus (100) dalam bentuk persentase. Analisis efektivitas pengelolaan anggaran Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2020 dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara outcome dengan output.

3. Membuat kesimpulan

Hasil menunjukan temuan bahwa:

1. Tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018 sebesar 97.69% yang berarti kurang efisien.
2. Tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2019 sebesar 98.75% yang berarti kurang efisien
3. Tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2020 sebesar 76,88% yang berarti efisien.

Pembahasan

1. Pendapatan

Pada bagian pendapatan, jumlah PAGU tahun 2018 sebesar Rp. 145.650.000. dan realisasi sebesar Rp 1.662.277.069.60 yang berarti realisasi pendapatan naik mencapai 1,139.64% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada jumlah PAGU tahun 2019 sebesar Rp. 268.845.000.00 dan realisasi sebesar Rp 997.399.169.80 yang berarti realisasi pendapatan naik mencapai 370.99% dari anggaran yang telah ditetapkan. Terakhir pada jumlah PAGU tahun 2020 sebesar Rp. 30.180.000.00 dan realisasi sebesar Rp 809.885.195.40 yang berarti realisasi pendapatan naik mencapai 268.35% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian hasil analisis menunjukkan bahwa rasio pendapatan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 diklasifikasikan menjadi sangat efektif.

2. Belanja

Pada bagian jumlah pos belanja tahun 2018 sebesar Rp 2.579.455.152.852.42 dimana realisasi belanja Rp 2.519.744.926.642.00 turun dari anggaran yang telah ditetapkan tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar 97.69% dinyatakan kurang efisien. Selanjutnya jumlah pos belanja tahun 2019 sebesar Rp 2.624.917.540.846.05 dimana realisasi belanja Rp 2.591.982.623.125.00 juga menurun sehingga tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar 98.75% dan dinyatakan kurang efisien. Pada tahun 2020 jumlah pos belanja sebesar Rp 30.180.000.00 dimana realisasi belanja Rp 809.885.195.40 dimana realisasi belanja mengalami peningkatan dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 78,88% dan dinyatakan efisiensi.

a. Belanja Tidak Langsung

Pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2018 jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.894.692.298.330.00 dan realisasi sebesar Rp. 1.862.701.309.602.00 artinya realisasi pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2018 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Disamping itu, pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2019 jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.917.439.951.345.05 dan realisasi sebesar Rp. 1.893.856.911.750.00 artinya

realisasi pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2019 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Selanjutnya pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2020 jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.845.253.795.439.30 dan realisasi sebesar Rp1.773.848.533.778.00 artinya realisasi pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2020 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Dengan demikian dari hasil analisis jumlah belanja tidak langsung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 tergolong tidak menguntungkan.

b. Belanja Langsung

Pada pos belanja langsung pada tahun 2018 jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 684.763.854.522.42 dan realisasi sebesar Rp. 657.043.617.040.00 artinya realisasi pada pos belanja langsung pada tahun 2018 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Disamping itu, pada pos belanja langsung pada tahun 2019 jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 707.477.589.492.00 dan realisasi sebesar Rp. 698.125.711.375.00 artinya realisasi pada pos belanja langsung pada tahun 2019 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Selanjutnya pada pos belanja langsung pada tahun 2020 jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 854.021.531.599.60 dan realisasi sebesar Rp. 301.290.069.600.00 artinya realisasi pada pos belanja tidak langsung pada tahun 2019 turun dan diartikan tidak menguntungkan. Dengan demikian dari hasil analisis jumlah belanja langsung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 tergolong tidak menguntungkan.

3. Tingkat Efisiensi

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat diketahui tingkat efisiensi belanja Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang efisien. Hal ini didukung oleh data dan hasil analisis. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar 97.69% yang berarti kurang efisien. Selanjutnya tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar 98.75% yang berarti kurang efisien.

Disamping itu, tingkat efisiensi belanja menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 78,88% yang berarti efisien. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari jumlah belanja untuk tahun anggaran 2018-2020 hanya pada tahun 2020 jumlah belanja dinyatakan efisien.

4. Tingkat Efektivitas

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat diketahui tingkat efektivitas pendapatan tahun 2018-2020 dinyatakan sangat efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar 1,139.6% yang berarti sangat efektif.

Selanjutnya tingkat efektivitas pendapatan menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar 370.99% yang berarti sangat efektif. Disamping itu tingkat efektivitas pendapatan menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 268.35% yang berarti sangat efektif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2018-2020 dinyatakan sangat efektif.

KESIMPULAN

Hasil temuan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Realisasi, total PAGU tahun 2018 tepengaktualan yang berarti pengaktualan Realisasi naik mencapai 370.99%, tahun pengaktualan Realisasi naik mencapai 268.35% dari anggaran yang telah ditentukan. Pada untukan total pos pengaktualan turun dari anggaran tersedia, tahun 2018 anggaran belanja sebesar 97.69% Selanjutnya pengaktualan total pos belanja juga menurun dan tahun 2020 pengaktualan pos belanja mengalami peningkatan pada aggaran yang tetapkan. Pelaksanaan ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang baru sehingga membutuhkan total anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penyusunan aktivitas tersebut.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa diketahui tingkat efisiensi belanja Kantor Dinas Pendidikan pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang efisien karena di tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan anggaran dengan 97.69% dan 98.75% Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Realisasi menurut Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018 sebesar 1,139.6% yang berarti sangat efektif. Dengan demikian akan akan disimpulkan bahwa total belanja pada tahun 2018-2020 dinyatakan kurang efisien dan pada tahun 2020 dinyatakan efisien. Selain itu, peneliti mendistribusikan kesimpulan bahwa total Realisasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Dana 2018-2020 dinyatakan sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (4th ed.)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Darise, N. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi sektor publik)* Gorontalo: Indeks.
- Hasibuan, Malayu S.P 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Bumi Aksa.
- Pahala Nainggolan. 2012. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006. *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mahsun, M. dkk. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nafarin, M.2009. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Salemba Empat.
- M. Munandar 2011. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerjadan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE UniversitasGajahmada
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta